

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SULAWESI SELATAN

M. YUSUF INDRAWAN



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

M. YUSUF INDRAWAN
A31109279



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

M. YUSUF INDRAWAN
A31109279

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Agustus 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak.
NIP 196703191992032003

Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak.
NIP 196511271991032001

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak.
NIP 196503051992032001

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

M. YUSUF INDRAWAN
A31109279

telah dipertahankan dalam siding ujian skripsi
pada tanggal **11 Oktober 2013** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak.	Ketua	1.
2	Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak.	Sekretaris	2.
3	Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak.	Anggota	3.
4	Drs. Asri Usman, M.Si., Ak.	Anggota	4.

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak.
NIP 196503051992032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : M. Yusuf Indrawan

NIM : A311 09 279

jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Oktober 2013
Yang membuat pernyataan,

M. Yusuf Indrawan

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah, Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat-sahabat beliau. Semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semua di yaumul qiyamah nanti. Amin.

Gagasan yang mendasari penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Gagasan ini diperkuat dengan adanya bukti *research gap* yang terjadi di keadaan sebenarnya dengan teori yang telah dipelajari. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian dalam topik ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas budi baik dan peranserta para pihak yang telah membantu.

Pertama-tama, peneliti menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak. dan Dra. Hj. Nirwana, M.Si, Ak. selaku pembimbing peneliti. Kedua pembimbing peneliti merupakan pembimbing yang senantiasa membantu peneliti pada saat peneliti memiliki kendala dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, mereka memberikan masukan, arahan, dan nasihat yang dapat meyakinkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada tim penguji: Dra. Hj. Sri Sundari, M.Si., Ak. dan Drs. Asri Usman, M.Si., Ak. Mereka telah berkenan hadir dalam seminar proposal, ujian komprehensif, dan ujian skripsi, serta bersedia memberikan saran dan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini.

Terima kasih kepada Drs. M. Ishak Amsari, M.Si., Ak. selaku penasehat akademik peneliti, atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini, mulai dari awal studi hingga selesainya peneliti menempuh studi.

Terima kasih kepada seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua dan Sekertaris Jurusan Akuntansi, dosen-dosen, khususnya kepada dosen yang pernah mengajar peneliti, pegawai akademik, dan kemahasiswaan, mama-mama di kantin dan foto copy. Terima kasih juga kepada staf Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan yang telah membantu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat peneliti dan teman-teman mahasiswa lainnya. Terima kasih kepada Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA)

dan teman-teman KKN Gelombang 82 Kecamatan Sabbang Paru yang memberi pengalaman berharga kepada peneliti.

Terima kasih dan penghargaan tulus kepada kedua orang tua Ir. Rajendra dan Dra. Mujahida yang telah senantiasa berdoa dan memberikan dukungan moril dan materil kepada peneliti dalam menyelesaikan studi. Mereka telah menanamkan pada peneliti sikap positif terhadap ilmu pengetahuan serta senantiasa mengingatkan bahwa Allah SWT akan menaikkan setingkat lebih tinggi derajat orang yang berilmu. Terima kasih kepada saudara-saudara peneliti, Ahmad Wira Indrawan dan Siti Ainun Indarajati, atas doa dan dukungan yang diberikan kepada peneliti. Terima kasih kepada Dian Pertiwi atas dukungan, pengalaman, dan kenangan yang luar biasa baik dalam studi maupun dalam hidup peneliti. Peneliti hanya dapat menyampaikan terima kasih, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Amin.

Makassar, Oktober 2013

M. Yusuf Indrawan

ABSTRAK

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan

Factors Affecting Financial Performance of The Local Government on South Sulawesi

M. Yusuf Indrawan
Ratna Ayu Damayanti
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage*. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan, PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, *leverage*

This study aimed to analyze the factors that affect the financial performance of local government on the province of South Sulawesi. The factors used are revenue (PAD), intergovernmental revenue, the size of local government, and leverage. The data of this study using secondary data that the financial statements local government on the province of South Sulawesi in 2009-2011. This study uses multiple linear regression analysis model. Results of this study indicated that the PAD and the size of local government are factors that affect the financial performance of local government. Intergovernmental revenue and leverage had no effect on financial performance of local government.

Keywords: *financial performance, PAD, intergovernmental revenue, size of local government, leverage*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.6 Organisasi/Sistematika.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	10
2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	15
2.2.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah.....	16
2.2.3 Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran	16
2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan	17
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	18
2.3.2 <i>Intergovernmental Revenue</i>	19
2.3.3 Ukuran Pemerintah Daerah.....	20
2.3.4 <i>Leverage</i>	21
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Pemikiran.....	25
2.6 Perumusan Hipotesis.....	25
2.6.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.6.2 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah.....	26

2.6.3 Pengaruh Ukuran Pemda terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.6.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Populasi dan Sampel.....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi	31
3.5.1 Variabel Penelitian	31
3.5.2 Definisi Operasionalisasi	31
3.6 Metode Analisis Data	34
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	34
3.6.2 Model Analisis Data	34
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	35
3.6.3.1 Uji Multikolinieritas	35
3.6.3.2 Uji Autokorelasi.....	36
3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas	37
3.6.3.4 Uji Normalitas	38
3.6.4 Uji Hipotesis	38
3.6.4.1 Koefisien Determinasi.....	38
3.6.4.2 Uji <i>t</i>	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
4.1 Deskripsi Data	40
4.2 Pengujian Hipotesis.....	41
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	41
4.2.1.1 Uji Multikolinearitas	41
4.2.1.2 Uji Autokorelasi	42
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.2.1.4 Uji Normalitas.....	44
4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda	45
4.2.2.1 Hasil Regresi.....	45
4.2.2.2 Analisis Model.....	46
4.2.3 Hasil Uji Hipotesis	47
4.2.3.1 Koefisien Determinasi	47
4.2.3.2 Uji <i>t</i>	48
4.3 Pembahasan	49
4.3.1 Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	49
4.3.2 Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	50
4.3.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	51

4.3.4 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	51
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
5.3 Keterbatasan Penelitian	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Sampel Penelitian	30
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	40
4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	41
4.3 Hasil Analisis Regresi.....	45
4.4 Hasil Uji Hipotesis	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	25
3.1 Uji Autokorelasi	36
4.1 Hasil Uji Autokorelasi	42
4.2 <i>Scatter Plot</i> ZPRED dan SRESID.....	43
4.3 <i>Normal Probability Plot</i>	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Penelitian Terdahulu.....	61
2 Informasi IKKPD, PAD, <i>Intergovernmenta Revenue</i> , Ukuran Pemerintah Daerah, dan <i>Leverage</i>	64
3 Hasil Pengolahan Data.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan:

- (1) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah,
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
- (3) administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (1) dilakukan secara teisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada nomor (2).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan “pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan”.

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah harus mengelola keuangan daerahnya secara tertib dan dipertanggungjawabkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi efektif dan efisien.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya.

Tahap setelah pemerintah daerah melakukan tugas-tugasnya yang dituangkan dalam APBD adalah pengukuran kinerja untuk menilai tugas-tugas yang telah dilakukan. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD mengandung pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Halim, 2007:94). Menurut Mardiasmo (2009:121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu entitas telah melaksanakan tujuan entitas tersebut

dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Menurut Wilson *et al.* (2010:408) menyebutkan bahwa:

Ensuring that the government has the financial capacity to sustain desired services is the primary reason for managers to monitor financial performance... Decision makers external to the government also need to assess government performance as they decide whether to locate businesses in a city, work for public entities, or invest in municipal bonds

Pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009:123). Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas.

Tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah yang dikemukakan oleh Nur (2011) yaitu, masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, daripada belanja langsung, baik berupa dana pelayanan publik atau dana investasi yang terkait langsung dengan tujuan organisasi, sehingga mengakibatkan rendahnya nilai kinerja pemerintah di mata masyarakat. Kemudian pendapat dari Atmaja (2010) yaitu, berbagai penyimpangan pengelolaan keuangan

daerah yang disebabkan ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK khususnya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap LKPD tahun 2011 yang mengalami peningkatan dari pemeriksaan LKPD tahun 2010 yang menemukan 320 kasus ketidaktaatan terhadap perundang-undangan menjadi 337 kasus senilai 228,133 Milyar pada tahun 2011 yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriarsi (2012) yang menyatakan bahwa, semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, karena salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja (Greiling, 2005).

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah PAD (Nasution, 2011), *intergovernmental revenue* (Sesotyaningtyas, 2012), ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* (Sumarjo, 2010). Dari penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Nasution, 2011) dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Julitawati *et al.*, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sumarjo (2010) menyatakan bahwa faktor *leverage*

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Sumarjo (2010) dengan menambahkan indikator pada pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan dengan analisis kemandirian keuangan daerah dan tingkat efektivitas pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2008:232). Tingkat efektivitas pendapatan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2008:234). Penambahan indikator pada pengukuran kinerja keuangan tersebut sejalan dengan rekomendasi penelitian Sumarjo (2010).

Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti mengenai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut: **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam manajemen keuangan daerah seperti, penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah (Atmaja, 2010). Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK khususnya pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan terhadap LKPD tahun 2011

yang mengalami peningkatan kasus ketidaktaatan terhadap perundang-undangan dari pemeriksaan LKPD tahun 2010 yang berakibat terjadinya kerugian daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan masih rendah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2011), Sesotyaningtyas (2012), dan Sumarjo (2010) mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, PAD (Nasution, 2011), *intergovernmental revenue* (Sesotyaningtyas, 2012), ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* (Sumarjo, 2010). Berdasarkan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah PAD merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah *intergovernmental revenue* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah *leverage* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan mencari bukti empiris bahwa PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintahan, dan *leverage* adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi mengenai kinerja keuangan khususnya pada pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
2. Untuk pengembangan konsep dan teori lebih lanjut yang akan digunakan oleh penelitian lainnya yang ingin mengangkat topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah daerah khususnya di 24 pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagai bahan masukan mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Masyarakat, menjadi informasi dalam mengamati kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.
3. Akademisi, sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang konsentrasi ilmu akuntansi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan empat faktor yang memengaruhi kinerja keuangan yaitu, PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintahan, dan *leverage*. Penentuan faktor-faktor ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Pengujian faktor-faktor tersebut dilakukan dengan menggunakan LKPD 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2011.

1.6 Organisasi/Sistematika

Organisasi/Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 bagian, yaitu Bab I pendahuluan, Bab II tinjauan pustaka, Bab III metodologi penelitian, Bab IV hasil penelitian dan pembahasannya, serta Bab V penutup.

BAB I Latar Belakang

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan organisasi/sistematika.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V Penutup

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan meningkatnya PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,218 dimana nilai tersebut lebih dari $\alpha = 0,05$ ($0,218 > 0,05$). Besarnya *intergovernmental revenue* yang diperoleh pemerintah daerah dari pihak luar belum dapat digunakan secara baik. Terlihat dari besarnya jumlah belanja daripada realisasi pendapatan, yang berakibat pada kurang efisiennya pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran.

3. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 dimana nilai tersebut kurang dari $\alpha = 0,05$ ($0,008 < 0,05$). Hal tersebut disebabkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan berdampak pada tuntutan kinerja yang baik pada pemerintah daerah tersebut.
4. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2011 dengan nilai signifikansi sebesar 0,244 dimana nilai tersebut lebih dari $\alpha = 0,05$ ($0,244 > 0,05$). *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki dana yang kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau hutang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut.

1. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.
2. Pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 32,2%, berarti bahwa ada pengaruh sebesar 67,8% dari variabel-variabel lain di luar model penelitian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian

ini, misalnya menambah variabel-variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Peneliti juga menyarankan untuk menggunakan proksi lain untuk kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti aktivitas atau *debt service coverage ratio* (DSCR), sehingga dapat lebih menginterpretasikan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Selain itu, variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada PAD, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage*, masih banyak variabel lain yang bisa menjadi variabel independen di penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiken, Michael dan Hage, Jerald. 1968. Organizational Interdependence and Intra-Organizational Structure. *American Sociological Review*. (Online), Vol. 33, No. 6, (<http://www.jstor.org/discover/10.2307>, diakses 4 Mei 2013).
- Almilia, L. Spica dan Retrinasari, Ikka. 2007. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, 9 Juni 2009.
- Atmaja, Kurniawan T. 2010. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi DI Yogyakarta)*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011*. Jakarta: BPK-RI
- _____. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2011*. Jakarta: BPK-RI.
- _____. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012*. Jakarta: BPK-RI.
- _____. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2012*. Jakarta: BPK-RI.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Cooke, Terry E. 1992. The Impact of Size, Stock Market Listing, and Industry Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed. *Accounting and Business Research*. (Online), Vol. 22, No 87, (<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080>, diakses 4 Mei 2013).
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Greiling, Dorothea. 2005. Performance Measurement in the Public Sector: the German Experience. *International Journal of Productivity and Performance Management*, (Online), Vol. 54 Iss: 7, (<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1523669&show=abstract>, diakses 21 April 2013).

- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- _____. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan S. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, agency Cost and Ownership Stucture. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 (4): 305-360.
- Julitawati, Ebit, Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1, No.1: 1-15.
- Kieso, E. Donald, Weygandt, Jerry, and Warfield, Terry. 2011. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. Unites States of America: John Wiley and Sons, Inc.
- Kurniati, Siti. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mirza, Rifka Amalia. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2005 sampai tahun 2010*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasari, Debby. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Keinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun Anggaran 2007*. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin, 20-23 September 2012.
- Nam, Chan Woon dan Parsche, Rudiger. 2002. *Looking for Appropriate forms of Intergovernmental Transfers for Municipalities in Transition Economies*. Makalah disajikan dalam 42nd Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Dortmund, 27-31 Agustus 2002.

- Nasution, Nina Andriany. 2011. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis tidak diterbitkan. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan daerah dengan Pendapatan Asli daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1 (2): 1-14.
- Nur, Turiman F. 2011. *Tiga Belas Masalah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, (Online), (<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/05/tiga-belas-masalah-keuangan-negara-dan.html>), diakses 22 April 2013).
- Oyelere, Peter, Laswad, Fawzi, dan Fisher, Richard. 2003. Determinants of Internet financial reporting by New Zealand Companies. *Journal of International Financial Management and Accounting*. Vol. 14 (1), 26-51.
- Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Governement*. Disertasi tidak diterbitkan. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. 2010. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. 2000. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Ramsamy, Bala, Ong, Darryl, dan Yeung, Matthew C.H. 2005. Firm Size, Ownership, and Perfomance in The Malaysian Palm Oil Industry. *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*. Vol.1: 81-104.
- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2 (2): 138-150.
- Said, Darwis, Mardiana, Ria, Rahmatia, Amar, M. Yunus, Habbe, Abdul H., Damayanti, Ratna A., Pontoh, Grace, Djaya, Yansor, Thayf, Hendragunawan S., dan Fattah, Sanusi. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi 1*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

- Santosa, Purbayu B. dan Rahayu, Retno P. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Dinamika Pembangunan*. Vol. 2 (1): 9-18.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business 5th Edition*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, (Online), Vol. 1, No. 1, (<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/711>), diakses 21 April 2013).
- Sudarmadji, A. Murdoko, dan Sularso, Lana. 2007. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tipe kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Makalah ini disajikan dalam Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), Jakarta, Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007.
- Sularso, Havid dan Restianto, Yanuar E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. Vol. 1 (2): 109-124.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Suryani, Alfiah. 2010. *Pengaruh Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, dan Firm Size terhadap Kinerja Perusahaan yang Masuk dalam Kelompok Jakarta Islamic Index periode 2004-2008*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2000. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Wijaya, Tony. 2012. *SPSS 20; untuk Olah dan Interpretasi Data*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Wilson, Earl R., Reck, Jacquelin L., dan Kattelus, Susan C. 2010. *Accounting for Governmental and Nonprofit Entities 15th Edition*. New York: McGraw-Hill/Irwin.